



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia  
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT TIM  
PELAKSANA EITI**

Hari/Tanggal : Senin, 6 Agustus 2018  
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana,  
Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur  
No.2-4, Jakarta Pusat

Agenda : 1. Revisi Perpres 26/2010  
2. TOR Tim Pelaksana EITI  
3. Surat Keputusan Tim Pelaksana EITI  
4. Persetujuan Revisi Workplan 2018 dan Laporan  
Perkembangan EITI Tahun 2017  
5. Pembahasan Tindak Lanjut Pra Validasi

Peserta Rapat  
Instansi Pemerintah : 1. Kemenko Perekonomian Kedeputusan III: Bastian H,  
Nurwachid P, Agus Haryanto, Lucky, Rosiana, Suparjo  
2. Kemenko Perekonomian, Kedeputusan I: Susi Susyanti  
3. Kemenko Perekonomian: Biro HPH: Ketut, Dita, Fauziah  
4. Ditjen Minerba ESDM: Fadil, Nita  
5. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Sigit Harjanto, Eko,  
Teguh, Abdul  
6. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Robby Martaputra,  
Seprina Hasan  
7. SKK Migas: Selvi, Musfadilah D, Bayu

Asosiasi Industri dan Perusahaan : APBI-ICMA : Hendra Sinadia, Marvin G  
IMA : Adam Muhammad  
Pertamina : Ikhwan Aryan

Perwakilan Masyarakat Sipil

Sekretariat EITI : PWYP dan koalisi: Aryanto Nugroho, Tenti, Dakelan, Usman

KAP Heliantono dan Rekan :Edi Effendi, Ronald Tambunan, Agus Trianto, Doni Erlangga,  
Andrian, Anggi Gartika, Arief

: Asrini W

## A. PEMBUKAAN

Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Koordinator Nasional EITI, Bpk Bastian Halim membuka rapat. Bpk Bastian mempersilahkan Ketua Tim Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma untuk menyampaikan agenda rapat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pembahasan Revisi Perpres 26/2010

- Bpk Edi (Sekretariat EITI); TOR diperlukan untuk validasi yang akan dimulai 1 september, Perpres tidak mungkin selesai 1 september, workplan dan annual progress report sudah dibahas dan disampaikan, hanya meminta masukan sebelum diupload, dan yang terakhir tindak lanjut dari proses pra validasi.
- Bpk Ronald (Sekretariat EITI) : Draft revisi Perpres telah beberapa kali dibahas di Rapat Tim Pelaksana. Draft Perpres terakhir sudah disampaikan kepada biro hukum Kemenko Perekonomian. Mengubah judul karena Perpres tidak hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga tata kelola. Sehingga judul tidak berubah. Pasal-pasal banyak yang dikurangi oleh usulan biro hukum. Pertimbangan dari pengurangan, karena untuk revisi tak boleh lebih dari 50 persen perubahan.
- Disampaikan urgensi dari adanya revisi yaitu dalam meningkatkan transparansi dan perbaikan tata kelola. Dalam kerangka acuan Tim Pelaksana akan dibuat lebih detil. Itu usulan yang telah mendapatkan koreksi dari biro hukum. Yang perlu ditindaklanjuti apakah pandangan dari biro hukum apakah substansi ini tidak sepenuhnya pendapatan daerah dan pendapatan nasional perlu dibuat peraturan baru, tidak hanya revisi. Yang perlu diperhatikan, juga siapakah yang menjadi pemrakarsa.
- Bpk Bastian: Upaya revisi karena ada perubahan nomenklatur dan upaya perbaikan tata kelola. Di Jogja pernah dilakukan diskusi. Dihadiri juga oleh Kemenkumham, Sekneg dll. Revisi juga diperlukan untuk proses validasi.
- Bpk Ketut (Biro Hukum): Secara teknis perundang-undangan, dan perubahan tak mendasar dan content tak lebih dari 50% hanya perubahan. Informasi dari kami hanya penyempurnaan dan hanya terkait nomenklatur, dan belum menjangkau hal-hal yang substansial. Namun tadi disampaikan ada hal-hal elementer yang berbeda dari sebelumnya. Kami butuh informasi perbedaan yang elementer yang berbeda secara substantial dari sebelumnya. Kemudian kami juga melihat diselipkan pasal 1A yang maksudnya dapat kami sampaikan substansi ini kurang tepat. Karena maksud sebuah aturan pada tataran filosofis dan Undang-Undang. Jadi yang 1A jangan diselipkan, lebih baik diletakkan di dalam content. Mewujudkan keterbukaan adalah filosofis, bagaimana lebih membumi. Jadi pasal 1A lebih baik dicabut, kecuali di Undang-Undang. Perbaikan tata kelola, transparansi sudah ada di content. Siapa yang akan jadi pemrakarsa harus dibicarakan agar tak jadi masalah. Berdasarkan Perpres 87/2014 dan UU 12, Menko kurang tepat sebagai instansi pemrakarsa dari peraturan, kecuali kebijakan ekonomi, atau perintah langsung dari Presiden. Kalau ini dilaksanakan, sebagaimana resisten dari pelaku usaha dapat dilakukan, tapi kalau resisten, pelaku usaha dapat menggugat ke Komisi Yudisial dengan alasan tidak tepat Menko sebagai pemrakarsa. Jangan sampai sudah capek nanti kalah di pengadilan.
- Bpk Bastian: Waktu itu Bu Sri Mulyani sebagai Menkeu, dan beliau mendapat mandat dari Presiden untuk melaksanakan transparansi ini. Kemudian sempat kami membahas siapa yang saat ini menjadi pemrakarsa. Ini juga yang akan jadi salah satu materi untuk validasi. Karena masih sulit, kami juga konsentrasi untuk menyelesaikan TOR Tim Pelaksana dan SK Tim Pelaksana.

- Bpk Pak Ronald: Revisi Perpres banyak berisi tentang tata kelola. Walaupun judulnya pendapatan, aspek tata kelola juga kami perhatikan.
- Bpk Edi: Perpres ini sudah kami bahas beberapa kali, nanti kami ikuti masukan Pak Ketut dan akan kami bahas dengan Pak Ketut. Revisi ini juga berdampak pada perubahan Tim Pelaksana dan TOR Tim Pelaksana. Akan digunakan untuk validasi, untuk Perpres sepertinya sulit untuk dapat selesai tanggal 1 September.
- Bpk Bastian: EITI sebenarnya sudah banyak yang dilakukan. Setiap tahun laporan kami selalu dinilai dan hampir setiap tahun kita taat azas transparansi. Tahun lalu kita sebagai negara contoh untuk *commodity trading*, transparansi sektor migas. Kami juga sudah menyiapkan roadmap *Beneficial Ownership* untuk membuka data pemilik manfaat. Ini sebagai salah satu alasan agar pelaksanaan EITI tetap harus dilakukan. Sekretariat EITI harus menindaklanjuti dengan dikuasi dengan biro hukum, termasuk menentukan pemrakarsa dari revisi Perpres ini.

## 2. Term of Reference (TOR) Tim Pelaksana EITI

- Bpk Ronald: TOR Tim Pelaksana EITI telah disirkulasikan dan telah dibahas dalam workshop pra validasi pada bulan Juli lalu yang dihadiri juga oleh Sekretariat EITI Internasional. Sekretariat EITI Internasional meminta penambahan beberapa hal seperti tanggung jawab tim pelaksana EITI yaitu: meningkatkan kapasitas, menyetujui laporan tahunan, dan tim pelaksana berperan aktif dalam proses validasi.
- Hal lainnya yang disarankan oleh Sekretariat EITI Internasional yaitu rapat bersifat inklusif dimana semua anggota Tim Pelaksana dapat mengusulkan agenda. Dan saran ketiga adalah pembiayaan. Semua pembiayaan dibebankan kepada APBN dan sumber lainnya yang sesuai peraturan perundangan. Honorarium kepada Tim Pelaksana pada dasarnya dibiayai oleh instansi yang diwakili, walaupun demikian EITI Indonesia dapat membiayai secara terbatas. Kita jarang mengangkat tentang pembiayaan karena memang tidak sederhana. Mengenai TOR Tim Pelaksana dapat ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana EITI.
- Bpk Aryanto (CSO): Setiap anggota Tim Pelaksana memiliki satu suara, kami hanya bertiga sedangkan pemerintah 10. Mohon kejelasan, karena sebelumnya setahu saya pemerintah, perusahaan, dan CSO masing masing 1 suara. Untuk pembiayaan, kami agak sulit karena keterbatasan anggaran. Nanti kalau tidak hadir karena permasalahan biaya nanti akan dianggap tak aktif.
- Bpk Edi: Yang disampaikan Pak Ronald yang eksplisit di dalam TOR. Kalau keputusan diharapkan untuk konsensus. Tapi apabila tidak bisa, akan dilakukan voting. Sepertinya di keanggotaan perusahaan dan CSO sesuai masukan EITI Internasional kita tambah.
- Bpk Aryanto: Dari CSO 3 orang, 3 alternate. Jadi 6 orang tapi resminya yang anggota Tim Pelaksana 3 orang dan 3 alternate.
- Bpk Edi: Kalau seperti saran Pak Aryanto, berarti harus ada keputusan internal dulu di CSO, Perusahaan, dan pemerintah. Kalau tetap 3 orang, akan kita samakan dengan dasar hukum yang lama. Apabila ditambah keanggotaannya untuk CSO dan perusahaan, harus revisi Perpres dulu. Namun apabila masih tetap, akan dikembalikan yang lama.
- Bpk Pak Bastian: Apakah akan berpengaruh untuk validasi? Bpk Aryanto: Yang dinilai yang existing atau akan? Sepertinya yang existing. Bpk Bastian: Penilaian yang dinilai dari yang sudah existing sampai 1 September 2018. Berarti dikembalikan sesuai dengan dasar hukum yang lama.
- Bpk Edi: Untuk pembiayaan, harus dicantumkan di TOR. Karena sebelumnya yang diberikan pembiayaan pemerintah, maka kami tulis berasal dari pembiayaan masing-masing instansi. Namun untuk CSO kami tambahkan dengan pembiayaan dari Sekretariat yang terbatas. Bpk Aryanto: Cukup ditulis dari APBN dan pembiayaan lain. Bpk Bastian: Apabila ada anggaran pasti juga akan berikan biaya untuk CSO. Walaupun anggaran terus berkurang.

### 3. Pembahasan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana EITI

- Bpk Ronald: Mengenai keanggotaan Tim Pelaksana dari pemerintah, asosiasi, dan CSO. Agar lebih cepat, draft yang kita susun yang tadinya keputusan Menteri menjadi Keputusan Deputi. Keanggotaan CSO dan asosiasi tetap 3 perwakilan. Karena 3 perwakilan, maka yang 3 alternate CSO akan dikeluarkan dari SK. Masih harus didiskusikan dengan biro hukum.
- Bpk Bastian: Sambil menunggu revisi Perpres, Kalau tidak bermasalah dengan validasi, SK ini bisa langsung dijalankan. Secara substansi SK ini sudah harus disetujui. Bpk Ronald: Ini hanya soal nama perwakilan, sebenarnya sudah disetujui. Untuk wakil dari Pemerintah Daerah, masih tetap. Karena belum ada revisi Perpres.
- Bpk Bastian: Beberapa Tim Pelaksana yang selalu hadir apakah bisa dimasukkan namanya dalam tim? Bpk Ronald: Kalau di Perpres untuk perwakilan pemerintah, sudah disebutkan nama jabatan, bukan nama pejabat. Untuk perwakilan lainnya hanya lembaga saja. Jabatannya disebutkan dalam Keputusan Menteri. Karena berharap cepat, maka disebutkan di Keputusan Deputi.
- Bpk Aryanto: Kalau disebutkan nama, nanti akan susah apabila ada perpindahan jabatan oleh perwakilan tersebut. Seperti sekarang nama Pak Emil Salim masih di dalam Perpres.
- Bpk Edi: Apabila ada usulan nama untuk dari perwakilan pemerintah, akan melalui proses panjang untuk menunjuk nama-nama tersebut.
- Ibu Selvi (SKK Migas): Dulu mengajukan nama untuk tim teknis, tapi kami memberikan nama jabatan karena banyak rotasi.
- Bpk Robby (Ditjen Anggaran): Keanggotaan kami selalu mengajukan nama jabatan karena sering terjadi perubahan.
- Bpk Bastian: Jadi kita putuskan masih seperti yang sekarang.

### 4. Persetujuan Revisi Workplan 2018 dan Laporan Perkembangan Tahunan EITI 2018

- Pak Edi: Agenda selanjutnya pembahasan revisi workplan dan progress report/Laporan Perkembangan Tahunan EITI. Progress Report sudah kami kirimkan, masukan akan kami tunggu sampai hari Jumat, 10 Agustus 2018. Apabila tidak ada masukan maka dianggap setuju dan akan kami upload di website EITI.

### 5. Pembahasan Tindak Lanjut Pra Validasi

Bpk Edi: Agenda selanjutnya adalah tindak lanjut persiapan validasi. Dari catatan Gay Ordenes saat di acara workshop dan pertemuan bilateral.

1. Government engagement: persiapan Perpres dan dokumen lain sudah kami siapkan
2. Engagement IPA: IPA masih engage dengan kita walaupun dulu sempat meminta mundur Engagement dengan perusahaan sudah, kita juga akan melaksanakan sosialisasi di Bali
3. Engagement dengan CSO, sudah silahkan apabila ada masukan dari CSO

- Pelaksanaan workplan sudah ada di Progress Report. Juga diminta proses penunjukan anggota timlak di CSO. Engagement increasing of government perlu ditingkatkan. Capacity building juga beberapa kita lakukan dank ke depan diharapkan dapat reguler.

- Outcome dan impact kita akan segera selesaikan hasil dari impact assessment. Kompilasi dari liputan media sudah dilakukan. Minerba sudah dicatat di laporan dan di Migas tentang *license transfer allocation* tidak ada di migas dan tidak bisa ditransfer. Transfer saham bisa tapi lebih bisnis ke bisnis baru lapor ke pemerintah. Mungkin dijelaskan saja aturan yang mengatur itu. Untuk SKK Migas penambahan wilayah kerja kalau ada nanti disampaikan ke Sekretariat (tahun 2013 – 2014) karena yang 2015 sudah ada.

- License register ada di Geoportal. Yang tidak ada di Geoportal *date of application*. BUMN tentang pembiayaan Bank sudah kami kontak ke BUMN dan ada di Laporan Keuangan BUMN. Production data

migas dan minerba sudah ada dan telah diupload. Data produksi perprovinsi, SKK Migas tak ada, adanya perblok. Aryanto: Perprovinsi harusnya ada. Nanti dicek ke Minerba. Data ekspor perprovinsi kita belum dapat. Dulu ada keengganan karena ada pelabuhan ekspor, takutnya diklaim provinsi lain. Mohon apabila ada kami diberikan informasi.

- In kind revenues volume dan total penerimaan sudah dijelaskan oleh Deputi SKK Migas. BUMN yang ada Pertamina mengumpulkan penerimaan bagian negara. SKK kita harus konsisten kita tidak bisa buka perbuyer. Robby Ditjen Anggaran: Jadi yang kita buka bukan perbuyer tapi perjenis. Lebih baik nanti ada data Pertamina dicocokkan dulu dengan SKK Migas biar tak ada lagi perdebatan di belakang.

- Aryanto: Yang jadi narasumber dalam validasi harus orang yang tepat. Kita harus bisa menunjukkan hasil-hasil pelaksanaan EITI karena hasil impact assessment cukup mengkhawatirkan.

### **C. PENUTUP**

Bpk Bastian menutup rapat dengan menyampaikan agar semua keputusan rapat agar ditindaklanjuti.

### **D. HASIL KESEPAKATAN RAPAT**

1. Akan dilakukan tindak lanjut proses revisi Perpres 26/2010 dengan melakukan diskusi dengan Biro Hukum, Kemenko Perekonomian.
2. Tim Pelaksana EITI menyetujui TOR Tim Pelaksana EITI dan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana EITI. Agar lebih cepat prosesnya, TOR dan SK akan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup.
3. Laporan Perkembangan Tahunan EITI 2018 telah disetujui dan apabila ada tanggapan dari Tim Pelaksana EITI dapat disampaikan dalam waktu seminggu.
4. Validasi akan dimulai pada 1 September 2018. Sekretariat EITI akan meminta bantuan apabila ada dokumen yang belum lengkap.